



Gubernur: Tak Ada Lagi Perundingan

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, tidak akan ada lagi perundingan terkait ganti rugi bagi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang tidak memiliki sertifikat tanah. Mereka tetap harus pindah ke rumah susun tanpa ada penggantian berbentuk uang.

"Untuk 527 bidang tanah di Kampung Pulo sudah tidak ada perundingan lagi. Silakan ambil kunci dan masuk ke rusun," ujar Basuki di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/8).

Menurut Basuki, hasil perundingan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan warga sederhana saja. Pertama, kata dia, warga sepakat Kampung Pulo tak boleh banjir lagi. Kedua, mereka tak ingin dipindahkan jauh dari Kampung Pulo.

Oleh karena itu, Pemprov DKI membongkar kantor Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur untuk membangun Rusun Jatinegara Barat guna menampung warga yang terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Kesepakatan ketiga, pembongkaran hunian warga dilakukan setelah Lebaran. "Ini sudah selesai Lebaran. Kami bisa langsung membongkar sekarang. Saya sudah perintahkan wali kota, mereka harus pindah," kata Gubernur.

Basuki menambahkan, warga yang memiliki KTP DKI boleh menempati rusun yang telah disediakan. Hak menempati rusun diberikan seumur hidup sehingga unit rusun tak boleh dijual atau disewakan.

Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana menyatakan, Kamis pekan depan, pihaknya akan merelokasi warga 517 rumah di Kampung Pulo.

Bambang menambahkan, pihaknya telah menyiapkan 520 unit rusun di Rusun Jatinegara Barat untuk menampung warga yang direlokasi tersebut.

Akan tetapi, kata Bambang, sampai kemarin baru 67 unit rusun yang sudah ditempati warga. Sebanyak 119 warga sudah mengambil kunci dan yang mendaftar sudah 406 warga.

Sementara itu, proses gugatan warga Kampung Pulo terkait dengan surat peringatan relokasi yang dikeluarkan Satpol PP Jakarta Timur masih berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam gugatan tersebut, warga mempermasalahkan surat peringatan relokasi yang tidak berangkat dari kesepakatan warga.

Warga kecewa

Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan Kampung Melayu Holili menegaskan, warga kecewa dengan keputusan Gubernur DKI yang akan tetap melaksanakan relokasi. Sebab, dalam pertemuan 5 Juli lalu di Kecamatan Jatinegara, warga tidak sepakat dengan keinginan pemerintah untuk merelokasi warga Kampung Pulo tanpa ganti rugi.

Holili menegaskan, warga Kampung Pulo tetap bertahan di rumah masing-masing jika terjadi pengusuran. Ia mengatakan, pihaknya belum memutuskan apakah akan melakukan perlawanan fisik atau tidak. "Namun, yang pasti kami akan melawan di jalur hukum, seperti gugatan yang kami ajukan ke PTUN," kata Holili.

(FRO/MDN/BOI)